

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekuasaan dimasa lampau adalah gambaran bahwa kedudukan atau kekuasaan para Raja dalam menegakkan kekuasaannya juga seringkali melibatkan para jago. Terlebih dalam konteks persaingan perebutan kekuasaan. Para jago sering pula disebut sebagai tukang pukul raja. Dengan tujuan untuk merebut kekuasaan. Terutama dimasa kerajaan, kekuasaan selalu mendasarkan diri pada kharisma Raja dan penguasa yang ditopang melalui pemeliharaan para Blater yang disebut jagoan untuk melanggengkan kekuasaan. Seperti yang terjadi dikawasan Madura barat Kabupaten bangkalan. Begitu banyak kedudukan yang tidak merata pada posisinya untuk meraih kekuasaan dengan keputusan yang sepihak, sedangkan Negara sebagai institusi kekuasaan tidak cukup mampu menerapkan tatib hukum, bahkan peran Blater di jadikan alat pengintai yang membuat eksistensi Blater seolah-olah terlindungi oleh kekuasaan formal yang ada.

Sementara itu Blater adalah komunitas sosial yang memiliki kebiasaan atau adat yang dapat berbeda dengan kebiasaan kiai dan santri. Blater juga memiliki ciri tersendiri dibedakan eksistensinya dengan cultur santri. Blater sendiri menyukai tradisi remo,sabung ayam, kerapan sapi, perjudian sampai berbentuk kriminalitas. Ciri lain yang melekat pada Blater adalah menyukai ilmu-ilmu magis, ilmu kebal, pecak silat dan menjunjung tinggi kehormatan dan harga diri, tetapi sebatas untuk pengembangan dirinya semata, yang menonjol justru peran “ sosialnya” sebagai sosok yang kuat di desa (Rozaki 2004: 73)

Dalam suatu masyarakat seringkali ditemui sekelompok individu yang memiliki peran masing-masing dalam menentukan kehidupan bermasyarakat, namun peran tersebut sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan membentuk sebuah elemen masyarakat didalam kultur budaya dan sosial yang kurang riil. Salah satunya adalah pulau Madura yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya

manusia cukup memadai dan tinggi, baik disektor pertanian, ekonomi, dan politik. Akan tetapi kondisi ini tidak bisa dimanfaatkan secara efektif dalam pengelolaan, khususnya terhadap pembangunan desa, karena adanya status kedudukan dan kekuasaan yang kerap kali menjadi prioritas utama dalam mendapatkan suatu keinginan untuk menjalankan peran itu baik berkelompok atau individu (Kosim, 2007)

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari sasaran pembangunan nasional. Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah warga masyarakat Indonesia seluruhnya, dimana warga masyarakat tersebut merupakan obyek dan objek pembangunan nasional, karena pembangunan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan kata lain keberhasilan pembangunan Desa tidak terlepas dari partisipasi seluruh warga masyarakat desa. Pelaksanaan pembangunan desa, perwujudannya dapat bermacam-macam, seperti pelayanan kesehatan, penyuluhan, bantuan teknis, penyediaan kebutuhan air, listrik, jalan serta perumahan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup rakyat.

Khususnya di jaman Orde Baru, lebih menganut paradigma pembangunan Tradisional yang dilandaskan pada *First Fundamental Theorem Of Welfare Economics*. Dimana pemerintah cenderung lebih menekankan pembangunan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi/efisiensi (aspek ekonomi) dan mengabaikan unsur pemerataan. Pemerintah juga menerapkan sistem perencanaan pembangunan maupun pemerintah yang sentralistik, padahal kebutuhan dan kondisi sosial-ekonomi dan lingkungan masyarakat Indonesia sangat beragam. Pembangunan pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya, maka tujuan ekonomi bukan menjadi satu-satunya tujuan dalam pembangunan, harus berkelanjutan, dimana manfaat atau kesejahteraan yang didapat dari pembangunan harus dirasakan sama oleh masyarakat dan dapat diadopsi. Setiap upaya pembangunan di manapun dan luasnya atau level wilayah apapun yang diharapkan mampu menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan tidak hanya sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi atau efisiensi, namun juga tujuan sosial dan ekosistem. Usaha-usaha ekonomi yang telah ada

atau yang akan tumbuh di masyarakat perlu didukung melalui penciptaan atmosfer usaha yang kondusif. Dalam hal ini pembangunan ekonomi berbasis ‘ekonomi kerakyatan’ harus diterapkan atau berbasis sumber daya lokal perlu digalakkan. Supaya keberpihkan Blater tidak seharusnya semata-mata pada kepentingannya, namun juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Pelibatan masyarakat setempat dalam pembangunan, khususnya sebagai pelaku tidak hanya sebagai objek mutlak dilakukan, termasuk investasi berbasis masyarakat (Indahsari,2010;23)

Sedangkan desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial,ekonomi,politik dan kultur yang terdapat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain. Menurut undang-undang No. 32 tahun 2004. Desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dibentuk dalam pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten atau kota, sebagaimana yang telah dimaksudkan oleh Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hermansyah, 2015)

Kalau ada orang berpendirian bahwa supaya dapat maju, orang Desa itu harus di dorong supaya bekerja lebih keras, maka amat sangat setuju dengan pendirian itu, seorang ahli ekonomi, B.H. Hoselitz, dalam bukunya *Role Of Incentive In Industrialization* bahwa untuk membangun suatu masyarakat yang ekonominya terbelakang itu harus bisa menyediakan suatu sistem perangsang yang dapat menarik aktivitas warga masyarakat. Sistem perangsang itu harus sedemikian rupa sehingga dapat memperbesar kegiatan orang bekerja, dan memperbesar keinginan orang untuk menghemat dan menabung, dan memperbesar keberanian untuk orang mengambil resiko dalam hal mengubah secara revolusioner dengan cara-cara yang lama. Orang desa tidak usah ditarik atau didorong untuk berkerja keras, hanya cara-cara dan irama bekerja itu harus diubah dan disesuaikan dengan cara dan irama yang dipelihara dengan disiplin yang tegang, agar tenaga yang dikeluarkan dapat seirama dengan berjalanya mesin dengan memberi hasil seefektif-efektifnya. Demikian, walaupun orang desa itu

bisa dan biasa bekerja keras, tetapi kalau itu bekerja dalam sistem–sistem produksi modern, ia toh harus banyak mengubah adat dan kebiasaan bekerjanya (Sajogyo & Sajogyo, 2005)

Blater adalah orang yang bisa diajak musyawarah atau orang panutan desa, serta dijadikan sebagai orang tua “sesepeuh” di setiap kampung-kampung maupun desa. Inilah keistimewanya seorang Blater apabila dilihat dari sisi positifnya dimana bisa mengayomi masyarakat, mempunyai tanggung jawab besar dan rasa kepedulian tinggi terhadap keamanan suatu desa, kehidupan seorang Blater mampu memberikan ekpentasi dalam perkembangan pembangunan desa yang membuat masyarakat di Desa kombangan mempercayakan sebuah relasi, meskipun begitu, jangan lupakan status elite Desa kombangan lainnya yaitu seorang kiai sebagai control sosial, namun dominasi seorang Blater telah memberikan sinyalir dalam backup sebuah jajaran pemerintahan Desa kombangan. Kiai dan Blater sama halnya dengan hitam dan putih diatas kertas, baik Kiai dan Blater memiliki peran yang berbeda dalam menangani atau memberikan pandangan terhadap relasi kemajuan pembangunan yang kondusif, meskipun tujuannya tetap sama adalah kepentingan kesejahteraan masyarakat di Desa kombangan, namun kehidupan Blater terhadap masyarakat setempat lebih luas dalam komunikasi secara langsung, sedangkan dari sisi negatifnya, secara fakta sering ditemui jika seorang Blater identik dengan kekerasan atau kriminalitas baik dalam pengambilan suatu keputusan. Kemudian berbicara soal aspek ekonomi, sosial, dan politik. Status kedudukan menjadi senjata meskipun bukan pada porsi dan tempat yang sebenarnya, Seperti yang telah terjadi, di Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, keterlibatan peran Blater dalam pembangunan Desa menimbulkan pencitraan terjadinya diskriminasi dalam masyarakat setempat, kedudukan dan kekuasaan seakan–akan telah membuat Blater lupa dengan nilai-nilai dan norma. masyarakat setempat merasa disingkirkan dalam memajukan sektor perekonomian pembangunan desa yang dilakukan dalam bentuk pembangunan secara fisik, karena peran Blater begitu dominan dalam hal material desa.

Berdasarkan pernyataan di atas yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk lebih mengetahui sedalam mana Peran Blater dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Bangkalan (Study Kasus di Desa Kombangan Kecamatan Geger Bangkalan).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Peran Blater dalam Pembangunan Desa di Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui bagaimana Peran Blater dalam Pembangunan Desa di Desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau menambah pengetahuan terhadap pembaca diantaranya sebagai berikut.

a. Bagi Akademis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan dan pengetahuan pada khususnya yang berhubungan dengan ilmu sosial.
2. Memberikan sumbangsih ilmiah, dalam hal ini dapat memberikan data-data baru yang berkenaan dengan sosial dan pemerintahan, khususnya yang berkenaan dengan Peran Blater Dalam Pembangunan Desa.

b. Bagi Peneliti

1. Sebagai proses pembelajaran dan acuan bagi peneliti selanjutnya apabila akan melakukan penelitian yang lebih lanjut yang berkenaan dengan peran blater dalam pembangunan desa.
2. Dalam penelitian ini sekiranya berupaya dan memberikan referensi serta pertimbangan bagi kita untuk

mengetahui keterlibatan peran blater dalam pembangunan desa.

c. Bagi Pemerintah

1. Sifat praktis memberikan gambaran serta memberi dorongan terhadap pembangunan desa, dan juga terhadap tokoh-tokoh khususnya kepada blater dalam ikut serta menjaga mengamankan dan memajukan pembangunan yang ada di desa.
2. Memberikan masukan pada pemerintah, tentang adanya peran-peran tokoh diluar pemerintahn yang formal, ikut serta dalam memajukan pembangunan yang ada di desa sehingga peran blater perlu di perhatikan.